

FASE EKONOMI KOREA SELATAN MENUJU TINGGAL LANDAS DAN FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNGNYA

Azwirda Aziz¹, Hamdi Nur², ³Atik Budi Paryanti

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta, ²Universitas Bung Hatta

¹azwirdaaziz@gmail.com, ²hamdi.nur@bunghatta.ac.id, ³atikbudiparyanti@gmail.com

ABSTRACT: *Korea was one of the poorest countries in the world in the 1960s. However, by 1995 South Korea had become the 11th largest economy in the world. South Korea's phenomenal economic growth is also known as the "Miracle on Han River" (the Han river is a river that flows across the capital Seoul). Indonesia and South Korea have almost the same start of economic development with the per capita income of the population which is also almost the same but with different achievements. There is a contrast between the economic success of these two countries as seen in the GDP per capita of the two countries which is much different. This study aims to find out what policies they have implemented, what development models they have implemented and what factors influence it. Next, compare the economic development of Indonesia with that of Korea to see more clearly the lessons that can be drawn in developing the country's economy. This research is a library study. The results of the research show 1. South Korea's industrialization policy is carried out consistently while Indonesia is inconsistent 2. South Korea is poor in natural resources while Indonesia is rich in natural resources. The lack of natural resources has made them carry out ambitious industrialization policies by gradually developing heavy industries and hi-tech industries. Therefore, the path taken is to limit foreign investment, protect local industries and strengthen them so that they can compete for exports. Meanwhile, Indonesia, which is rich in natural resources, invites foreign investment in natural resource extraction and exports based on natural resources, but forgets to develop a competitive industry.*

Keyword: economic growth, development models, foreign investment,

PENDAHULUAN

Korea merupakan salah satu negara termiskin di dunia pada tahun 1960-an. Berdasarkan data World Bank, pada tahun 1960 nilai GDP negara ini hanya USD \$ 3,9 juta tetapi pada tahun 2019 telah mencapai USD \$ 1.600 milyar. Sementara GDP/kapita meningkat dari USD \$ 932 menjadi USD \$ 28.675 dalam rentang tahun tersebut atau meningkat 30 kali. GDP/kapita telah mencapai angka psikologis \$20.000 di tahun 2006. Ekonomi tumbuh rata-rata 10%/tahun selama 30 tahun antara tahun 1962 dan 1994. Korea Selatan pada tahun 1995

telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke 11 di dunia.

Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang fenomenal ini disebut juga dengan "Miracle on Han River" (sungai Han adalah sungai yang mengalir melintasi ibukota Seoul). Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini menarik untuk menjadi bahan penelitian untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah mereka jalankan selama tahapan pembangunan, model pembangunan apa yang mereka terapkan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian membandingkan dengan perkem-

bangun ekonomi Indonesia untuk melihat dengan lebih jelas pelajaran yang bisa diambil dalam membangun perekonomian negara. Lingkup kajian pembangunan ekonomi ini mulai dari dimulainya pembangunan ekonomi tahun 1962 sampai tahap tinggal landas mulai tahun 1980an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian baik yang terdapat di perpustakaan maupun di internet.

PERKEMBANGAN EKONOMI KOREA SELATAN

Setelah perang dunia kedua terdapat beberapa hal penting dalam pembangunan. Berikut dipaparkan secara ringkas sejarah tahapan perkembangan perencanaan ekonomi Korea Selatan yang dirangkum tersedia di media elektronik (internet) dari berbagai sumber (Carter et al., 1990; Heo et al., 2008; Seth, 2017). Tahapan perkembangan ini memperlihatkan bagaimana tahapan tinggal landas ekonomi dijalankan secara terencana dengan konsisten.

1. Era pemerintahan pertama (1948-1960)

Korea Selatan dengan Presiden Syngman Rhee. Pemerintahan pertama Korea Selatan pada tahun 1948 melakukan *land reform* yang berperan dalam meningkatkan produksi pertanian, menumbuhkan lapangan kerja dan mendorong pemerataan.

2. Pemerintahan kedua (1960-1961)

Pemerintahan Chang Myon berlangsung hanya satu tahun tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap perjalanan ekonomi Korea Selatan selanjutnya. Akan tetapi hal yang penting dilakukannya dalam masa pemerintah

yang singkat tersebut yaitu: (a) Mempersiapkan Kebijakan ekonomi pertama (rencana pembangunan ekonomi 5 tahun) dan menjalin kerjasama ekonomi dengan Jepang, (b) Membuat kebijakan ekspor industri dan membuat mega project infrastruktur yang menyerap 45 juta orang tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran, dan (c) Membuat rencana membangun pembangkit listrik, membangun industri dasar (pupuk, semen, pengolahan minyak, besi baja), membangun infrastruktur, meningkatkan produksi pertanian, mendorong pengembangan sains dan teknologi.

3. Era pemerintahan Park Chung Hee, menjalankan pembangunan berencana.

Pada jaman Park Chung Hee dimulai pembangunan berencana lima tahun ekonomi (Repelita). Masalah yang dihadapi Rejim Park adalah kemiskinan, modal untuk membangun industri. Simpanan dan modal domestik sangat rendah. Oleh karena itu kebijakan ekonomi yang diambil adalah membuat pinjaman luar negeri dan suku bunga rendah untuk mendorong produksi dalam negeri. Dengan akumulasi perkembangan di jaman kolonial Jepang dan bantuan Amerika Serikat, pada tahun 1960 Korea Selatan telah memiliki angkatan kerja terdidik dan infrastruktur yang modern. Pemerintah memutuskan berperan dalam pembangunan ekonomi karena tidak ada institusi lain yang memiliki kapasitas atau sumberdaya untuk membuat perubahan drastis dalam jangka pendek. Dalam kegiatan ekonomi terjalin kerjasama pemerintah dengan pengusaha swasta didukung oleh BUMN.

Kebijakan penting yang dibuat pemerintah dalam tahap ini dalam menggerakkan perekonomian seperti:

a. Pemerintah menjalankan kebijakan ekspor dengan memberi target produksi/target ekspor kepada perusahaan

swasta (chaebol) dengan instrumen terutama dengan mengontrol pemberian kredit.

- b. Menasionalisasi bank dan menyatukan koperasi pertanian dengan bank pertanian.
- c. Membentuk Badan Perencanaan Ekonomi pada tahun 1961 yang didukung oleh Korea Development Institute yaitu suatu lembaga independen dalam riset ekonomi yang dibiayai negara.
- d. Badan Perencana Ekonomi menetapkan target ekspor kepada perusahaan swasta. Kalau terpenuhi maka pemerintah mengucurkan kredit bersubsidi dan akses kepada pasar domestik yang sedang berkembang. Sementara kalau gagal pemerintah akan menghentikan kredit tersebut.
- e. Menerapkan kebijakan “self reliant industrial economy” dengan menerapkan strategi substitusi import yang didorong oleh faktor berkurangnya bantuan dari Amerika Serikat.

Rencana pembangunan lima tahunan yang dijalankan yaitu: dalam Repelita I (1962-66) membangun struktur industri untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang berorientasi pada produksi barang-barang bukan konsumsi dan tidak bergantung kepada minyak seperti elektrifikasi, membangun pabrik pupuk, pengolahan minyak, dan serat sintetis serta mendorong ekspor industri ringan. Program ini dilakukan dengan bantuan Amerika Serikat. Repelita II (1967-71) memodernisasi struktur industri dan membangun industri substitusi import seperti pabrik besi baja, mesin-mesin dan kimia. Selanjutnya dalam Repelita III (1972-76) Mendorong percepatan struktur industri berorientasi ekspor dengan mendorong perkembangan industri berat, kimia, besi baja, transportasi, peralatan elektronik rumah tangga, perkapalan, dan petrokimia. Juga membangun kompleks

industri di wilayah selatan yang relatif tertinggal.

Pemerintah kelihatannya menjalankan model kebijakan “growth pole” dengan mendorong perkembangan Industri propulsif yang kemudian akan mendorong perkembangan industri ikutan. Dengan kondisi negara yang kurang sumberdaya alam, kebijakan yang diambil kelihatannya melawan teori comparative advantage (Chang, 2006: hal 6-7). Perusahaan besi baja BUMN Korsel POSCO yang dibuat tahun 1970-an menjadi perusahaan besi baja dengan efisiensi biaya paling tinggi di dunia dalam satu dekade meskipun negara ini tidak memiliki bahan mentah biji besi (perusahaan ini sekarang telah diprivatisasi dan menjadi produsen besi baja kedua terbesar didunia). Pemerintah berperan besar dalam mendorong perkembangan industri. Contoh kebijakan yang dijalankan seperti pada tahun 1976 pemerintah Korsel memberi mandat bahwa seluruh minyak mentah harus diangkut dengan kapal yang dibuat oleh Hyundai Heavy Industries (HHI). Dalam 10 tahun kemudian HHI menjadi industri kapal terbesar di dunia.

Selanjutnya dalam Repelita IV (1977-81) membangun industri yang dapat bersaing pada pasar industri global. Pada tahap ini mulai terjadi pergeseran dengan mengembangkan industri strategis padat teknologi (*technology-intensive*) dan sekaligus juga industri padat tenaga kerja (*skill labor-intensive*) seperti permesinan, elektronik dan perkapalan.

Repelita V (1982-86) menggeser penekanan industri berat dan kimia kepada technology-intensive industries yang high technology product seperti mesin presisi, elektronik (televisi, videokaset, dan industri terkait

semikonduktor), dan informasi. Hal ini didorong karena penekanan berlebihan kepada industri berat yang pasar lesu menyebabkan struktur industri tidak seimbang dan terjadi inflasi akut.

4. Tahap tinggal landas

Dengan telah berkembangnya industri berbasis ekspor yang kuat maka pada tahap selanjutnya Korea Selatan mulai memasuki tahapan pembangunan industri high-tech. Pertumbuhan ekonomi meningkat pesat demikian juga dengan GDP per kapita. Mulai tahap ini dapat disebut pembangunan ekonomi Korea Selatan sudah mulai tinggal landas.

Repelita VI (1987-91) menjalankan kebijakan liberalisasi impor dengan membebaskan berbagai aturan hambatan nontarif. Pemerintah menjalankan kebijakan bantuan kepada industri tertentu dan mempercepat pengembangan sains dan teknologi dengan meningkatkan rasio investasi dari 2,4% menjadi 3% dari GNP sampai tahun 1991. Pada tahap ini mulai berkembang industri high technology (microelectronics, new materials, bio-engineering, optics, dan aerospace). Fasilitas industri high-tech ditempatkan tersebar pada tujuh kota untuk menyeimbangkan distribusi geografis dari industri. Masa ini dijalankan kebijakan "ekspansi global" yang mengubah Chaebol dari swasta nasional menjadi perusahaan multinasional. Selain itu juga dilakukan kebijakan meliberalkan ekonomi dengan mengizinkan pihak asing masuk di pasar saham dan perbankan.

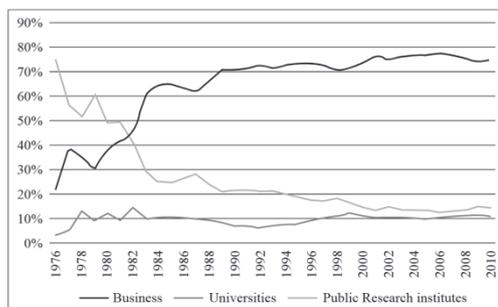
KEBIJAKAN EKONOMI UNTUK MENDORONG TUMBUHNYA INDUSTRI YANG KUAT BERDAYA SAING.

Beberapa kebijakan penting dalam mendorong tumbuhnya industri yang kuat berdaya saing diuraikan berikut ini.

- a. Kebijakan mendorong perusahaan berkompetisi. Pemerintah mendorong perusahaan berkompetisi didalam negeri. Sebelum krisis finansial tahun 1997 terdapat 4 perusahaan besar KIA, Asia Motors, Daewoo dan Hyundai walaupun selama krisis yang bisa bertahan hanya 2 perusahaan. Pemerintah mendorong entry dan exit policy, yaitu kebijakan yang memudahkan produsen manapun untuk memasuki ranah industri dengan mudah dan mudah untuk keluar, yang memudahkan produsen otomotif untuk mencapai skala ekonomi dengan cepat. Produsen yang mampu mencapai target akan ditunjuk oleh pemerintah untuk memperoleh semakin banyak pinjaman dan insentif. Selain itu untuk mendorong ekspor seperti dalam kasus industri otomotif, Korsel menjalankan strategi dumping.
- b. Kebijakan penanaman modal yang pro kepentingan nasional. Pada tahun 1960-an Korea Selatan membatasi investasi asing langsung dan lebih memilih mengambil pinjaman luar negeri untuk mencegah industri asing masuk yang dikhawatirkan melemahkan industri dalam negeri yang dinilai belum mampu bersaing dengan produk asing. Pada tahun 1970-an, pemerintah Korea Selatan mulai mengizinkan investasi asing masuk khususnya untuk mentransfer teknologi karena industri dalam negeri sudah dirasa cukup mampu untuk bersaing dan membutuhkan teknologi asing untuk dapat berkembang lebih lanjut.
- c. Pembentukan lembaga untuk mendorong ekspor. Pada tahun 1980-an Korea Selatan membentuk KOTRA (*Korean Trade Promotion Agency*) yang memberikan bantuan kepada investasi perusahaan Korea Selatan yang ditanamkan di luar negeri untuk meningkatkan *competitiveness* dari

chaebol dalam persaingan ekonomi global

- d. Kebijakan R&D. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pada Repelita VI (1987-91) pemerintah Korea menjalankan kebijakan bantuan kepada industri untuk mempercepat pengembangan sains dan teknologi dengan meningkatkan rasio investasi R&D. Jung, J., & Mah, J. S. (2013) mengatakan bahwa national innovation system (NIS) Korea bisa dibagi atas dua periode. Periode pertama antara 1960an sampai 1980an dengan peran besar oleh pemerintah dan sejak 1990an diambil alih oleh sektor swasta dimana *chaebol* memegang peranan penting dalam pengembangan NIS. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 dimana proporsi R&D pemerintah dan swasta seimbang pada awal 1980an tetapi kemudian peran swasta meningkat mencapai sekitar 75% pada tahun 2000an. Rasio ekpenditur R&D terhadap GDP secara konsisten meningkat antara 1980 dan 2010 dari 0,50% menjadi 3,74%. Meskipun proporsi R&D pemerintah menurun dibanding sektor lainnya tetapi secara absolut nilainya terus meningkat dan mencapai 1,02% dari GDP pada tahun 2010 dimana angka ini lebih tinggi dari rata-rata negara OECD sebesar 0,75%.



Sumber: Jung, J., & Mah, J. S. (2013)

Gambar 1: Proporsi R&D per sektor Korea Selatan

- e. Mendorong dan membatasi peran *Chaebol* dalam ekonomi nasional. Meskipun pemerintah membesarkan *Chaebol* dengan membuat proteksi dan memberi subsidi tetapi terdapat batasan terhadap kegiatan ekonomi *Chaebol* seperti: (a) Peraturan memisahkan antara sektor industri dan sektor finansial (*Chaebol* tidak lagi punya bank sejak 1982). *Chaebol* meskipun mendapat bantuan pinjaman dan dilindungi pemerintah tetapi dilarang memiliki bank privat. Alasan pemerintah untuk mendistribusikan resiko dan tetap mempertahankan keleluasaan peran pemerintah dalam mengalokasikan kredit. (b) Peraturan membatasi investasi *Chaebol* tahun 1999 agar fokus pada core bussiness dan menspinoff Industry tidak terkait. Setelah krisis finansial tahun 1997 pada tahun 2003 hanya 4 dari 18 *Chaebol* terbesar yang tetap bertahan seperti semula yaitu Hyundai, Samsung, Daewoo, dan LG. (c) Peraturan yang membatasi usaha asuransi. (d) Peraturan yang membatasi kemampuan *Chaebol* menyembunyikan hutang dan kerugian anak perusahaannya.
- f. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peran BUMN secara bertahap semakin dikurangi dengan cara privatisasi. Dimana pemerintah mengurangi kepemilikan saham. Pada saat krisis moneter tahun 1997 dengan intervensi IMF terjadi privatisasi yang ekstensif. Tetapi kalau dilihat dari sejarah, kebijakan privatisasi BUMN telah dijalankan Korea Selatan sejak mulai tahun 1968. Park dan Jin (2009) membagi perubahan peran pemerintah dalam pengembangan BUMN dalam tiga fase yaitu fase pertama (1962-1979) melalui intervensi langsung, fase dua (1980-1997) melalui intervensi tidak langsung dan fase ketiga sejak 1998

dengan pengurangan besar-besaran peran pemerintah. Contohnya pada kasus industri baja telah dilakukan pelepasan saham pemerintah meskipun terbatas kepada individu daripada kepada perusahaan seperti dilakukan kepada POSCO pada tahun 1987 yang waktu itu telah menjadi perusahaan industri baja yang besar. Perusahaan ini pada tahap selanjutnya diprivatisasi pada tahun 1997 dimana saham pemerintah menjadi kurang dari 20% dan diprivatisasi penuh pada tahun 2000. Sekarang perusahaan ini telah berinvestasi di berbagai negara. Alasan privatisasi kelihatannya bukan saja karena tidak efisiennya perusahaan tetapi karena juga karena pemerintah sebagai agen pembangunan merasa tidak perlu lagi banyak ikut campur dalam mengelola perusahaan negara.

MODEL KEBIJAKAN EKONOMI

Kebijakan ekonomi Korea Selatan dalam perjalanan sejarahnya kelihatannya menjalankan kebijakan berorientasi pasar tetapi dengan intervensi aktif pemerintah. Besarnya peran pemerintah dan terjadi aliansi negara dengan pengusaha, prioritas pertumbuhan ekonomi diatas pembangunan politik, fokus pada transfer teknologi, dan melakukan proteksi industri domestik.

Model pembangunan ekonomi ini menurut Jun (2013) merupakan gabungan antara “capitalistic market” dengan “capitalistic state”. Militer dan Chaebol dan BUMN berkoalisi memobilisasi perkembangan ekonomi dengan menggabungkan ideologi anti komunisme, nasionalisme, dan modernisasi. Dalam model pembangunan ekonomi tidak terdapat dikotomi antara negara dan pasar. Model yang dijalankan ini juga menganut prinsip “growth first, distribution second”.

Pembangunan ekonomi yang berhasil membawa Korea Selatan tinggal landas menjadi negara industri termasuk tipe ‘authoritarian developmentalism’ bukan satu-satunya di Asia tetapi juga terjadi di negara seperti Taiwan, Singapura, Malaysia, Philipina dan Indonesia dalam rentang kekuasaan yang cukup lama (Suehiro, 2000, 115). Hal ini menjadi hal menarik untuk diketahui lebih jauh karena rejim setipe yang bermula lebih kurang dalam periode yang sama tahun 1960an seperti di Indonesia dan Philipina tidak berhasil membawa kemajuan ekonomi bagi negaranya.

PERBANDINGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KOREA SELATAN DAN INDONESIA

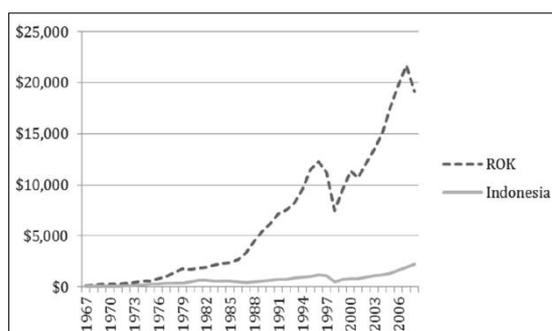
Berikut ini akan dibuat perbandingan antara pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara ini mempunyai start pembangunan ekonomi yang hampir sama dengan pendapatan perkapita penduduk yang juga hampir sama tetapi dengan pencapaian yang berbeda. Terdapat kontras antara keberhasilan ekonomi kedua negara ini seperti terlihat pada PDB per kapita kedua negara yang jauh berbeda. PDB perkapita Indonesia tertahan pada level sekitar USD \$ 3.500 sementara Korea Selatan telah melebihi USD \$ 20.000 (seperti terlihat pada gambar 4).

Indonesia dalam awal pembangunan orde baru membuka diri terhadap investasi langsung asing (*foreign direct investment*) dengan fokus pada ekstraksi sumberdaya alam oleh perusahaan multi nasional. Sementara Korsel yang tidak memiliki sumberdaya alam seperti Indonesia menjalankan kebijakan proteksi industri domestik dengan membatasi FDI serta mengendalikan sektor perbankan dan menggunakan instrumen kredit untuk mendorong mengembangkan

industri dalam negeri yang kuat dan ekspor.

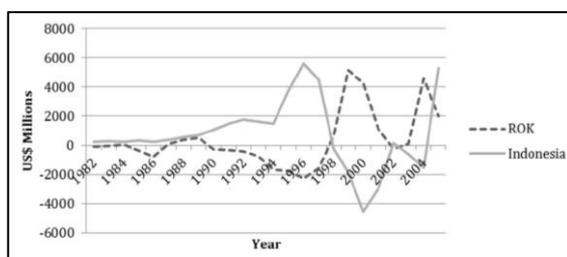
Perbandingan antara FDI Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 1982-2005 kelihatannya mempunyai pola yang berkebalikan. FDI Indonesia kelihatan semakin besar sejak 1982 sampai 2007 dan setelah krisis moneter terlihat menurun. Sementara Korea Selatan memperlihatkan pola sebaliknya (seperti terlihat pada gambar 5)

Peran politik luar negeri kelihatannya juga berperan besar. Amerika Serikat mendukung kebijakan protektif untuk Korsel tetapi sebaliknya mendorong keterbukaan ekonomi di Indonesia.



Sumber: Lobere, 2011

Gambar 2: Perbandingan PDB per kapita Indonesia dan Korsel antara tahun 1967-2004 (dalam US\$)



Sumber: Lobere, 2011

Gambar 3: Perbandingan investasi asing langsung (FDI) Indonesia dan Korea Selatan tahun 1982-2005 (dalam US\$)

Hal penting yang bisa digaris-bawahi dalam melihat perbedaan keberhasilan pembangunan antara kedua

negara yaitu pertama kebijakan Industrialisasi Korea Selatan dilakukan dengan konsisten sementara Indonesia sulit menjalankan kebijakan ekonomi yang konsisten. Sebagai contoh, pada tahun 1970an Ponco Sutowo melakukan penanaman modal dalam industri kapal. Kesuksesan mendorongnya untuk membangun empat industri kapal lagi. Tetapi pada pertengahan 1980an kelima industri kapal mengalami kerugian besar karena Menristek Habibie membangun industri kapal PAL di Surabaya sehingga Ponco kehilangan order kapal. Investasi industri membutuhkan kepastian jangka panjang khususnya yang padat modal dan teknologi. Akibatnya pengusaha tidak tertarik mengembangkan daya saingnya melalui peningkatan kemampuan teknologi (Irwan, 1990: 28).

Korea Selatan menjalankan kebijakan proteksi dan substitusi import dan mendorong ekspor dengan menciptakan persaingan domestik dengan kebijakan yang konsisten sementara Indonesia di jaman Orde Baru menjalankan kebijakan dengan patronase bisnis yang penuh ketidakpastian yang ujungnya menghasilkan industri yang tidak efisien dan tidak mampu mendorong tumbuhnya industri berdaya saing.

Hal kedua yang penting untuk melihat perbedaan antara kedua negara adalah faktor sumberdaya alam. Korea Selatan miskin sumberdaya alam sementara Indonesia kaya dengan sumberdaya alam. Miskinnya sumberdaya alam ternyata membuat mereka menjalankan kebijakan industrialisasi yang ambisius dengan secara bertahap mengembangkan industri berat dan industri hi-tech. Oleh karena itu jalan yang ditempuh adalah melakukan membatasi investasi asing, proteksi terhadap industri lokal dan memperkuatnya sehingga mampu bersaing untuk ekspor. Sementara Indonesia

yang kaya sumberdaya alam mengundang investasi asing dalam ekstraksi sumberdaya alam dan melakukan ekspor berbasis sumberdaya alam tetapi lupa mengembangkan industri yang berdaya saing.

KESIMPULAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi negara sedang berkembang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perencanaan ekonomi yang dirancang dengan visioner dan dijalankan dengan konsisten. Kondisi ketersediaan modal awal untuk mendukung pembangunan ekonomi (seperti ketersediaan simpanan dan modal domestik untuk membiayai investasi, tingkat pendidikan, kelas pengusaha yang terbentuk) berperan penting dalam menentukan jalan

kebijakan ekonomi yang ditempuh. Selain itu faktor non ekonomi seperti nasionalisme dan situasi geopolitik internasional turut berperan penting mempengaruhi kebijakan dan kemauan dalam membangun. Hal lainnya, kondisi demokratis atau tidaknya suatu negara ternyata tidak menjadi variabel penentu keberhasilan pembangunan ekonomi negara.

Faktor kekayaan sumberdaya alam (dilihat pada kasus Korea Selatan dibandingkan dengan Indonesia) ternyata bisa menjadi anugerah sekaligus justru bisa menjadi penghalang atau lebih buruk lagi menjadi kutukan. Demikian juga sebaliknya, miskinnya sumberdaya alam ternyata bisa menjadi pendorong kemajuan sektor industri suatu negara.

Daftar Pustaka

- Chang, Ha-Joon. (2006). *Understanding the Relationship between Institutions and Economic Development: Some Key Theoretical Issues*. UNU WIDER Discussion Paper No. 2006/05
- Heo, Uk; Jeon, Houncheul; Kim, Hayam; and Kim, Okjin. (2018) "The Political Economy of South Korea: Economic Growth, Democratization, and Financial Crisis," *Maryland Series in Contemporary Asian Studies*: Vol. 2008: No. 2, Article 1. Sumber: <https://digitalcommons.law.umaryland.edu/mscas/vol2008/iss2/1>
- Irwan, Alexander.1990. *Kolaborasi antar PMN, Posfordism dan Politik ekonomi Indonesia*. Prisma No.8 Tahun 1990, hal 19-29.
- Jin, Park. 2009. *Lesson from SOE Management and Privatization in Korea*. KDI School Working Paper Series No. 09-16
- Jun, Park Hyung. *The false dichotomy of South Korean Economic Theory*. interview tahun 2013. http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/603622.htmlPosted on: Sep.16,201)
- Jung, J., & Mah, J. S. (2013). R&D Policies of Korea and Their Implications for Developing Countries. *Science, Technology and Society*, 18(2), 165–188. doi:10.1177/0971721813489435
- Korea Old and New: A History*. By Carter J. Eckert, Ki-baik Lee,. Young lek Lew, Michael Robinson, and Edward W. Wagner. Seoul: Ilchogak, 1990. Pp. iv, 454.

Lobere, Nicolas. 2011. *What Makes a Tiger? Comparing Economic Growth in South Korea and Indonesia from 1945 through the Asian Financial Crisis*. *Korea SJAA*, Summer 2011, page: 112-123.

Page, John. The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy NBER Macroeconomics Annual 1994, Vol. 9. <http://www.nber.org/chapters/c11011>

Seth, M.J. (2017) South Korea's Economic Development, 1948–1996 Published online: 19 December 2017. Sumber:
<https://oxfordre.com/asianhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-271>

Suehiro, Akira. (2000). *Catch-up Type Industrialization*. Nagoya University Press.

World Bank publication (<https://www.worldbank.org/en/research>)

